



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

CACA SASMI OKTA PRAYATI

NIM: 11727202035

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual”**, yang ditulis oleh:

Nama : CACA SASMI OKTA PRAYATI
 NIM : 11727202035
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2021

Pembimbing Skripsi

Musrifah, SH., MH
 NIK.130 217 039

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **CACA SASMI OKTA PRAYATI**
 NIM : 11727202035
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah Di Munaqasahkan Pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Desi Devika Devra, M. Si

Penguji I
Hellen Last Fitriani, SH., M.H

Penguji II
Nur Hidayat, SH., M.H



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Caca Sasmi Okta Prayati, (2020):

Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengibiran harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat kita menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan tugas yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual serta faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Penelitian ini ialah penelitian empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yaitu mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 responden. Maka penulis mengambil sampel dengan teknik *Total Sampling*. Dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam kenyataannya masih belum berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan belum maksimalnya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru secara maksimal serta kurangnya tenaga ahli maupun konselor yang mumpuni dalam menyelesaikan setiap kasus yang masuk. Terlihat dari kurangnya dalam memberikan pelayanan pengaduan terhadap korban, konseling, bantuan hukum dikarenakan masih kurangnya konselor psikolog dan konselor hukum yang dimiliki.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah AWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau yaumul akhir kelak. *Aammiin*.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada:

1. Ayahanda tercinta Maferdi dan Ibunda tercinta Isnaningsih serta abang dan adik saya Taufiq Pramilo Koto dan Febriansyah yang telah memberikan seluruh dukungan dan ketulusan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a restu dan ridha nya.
2. Keluarga besar penulis di Lombok dan Padang yaitu, Mbah Uyt, Mbah Kakung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
5. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL., Selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Musrifah, S.H., M.H. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Lovely Dwina Dahren, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan Ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, para Staff Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Para Korban yang enggan disebutkan namanya oleh penulis yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada para Staff Tata Usaha Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta Jaksa Fungsional Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara kakak Deby



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Afrita, S.H, M.H, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada M. Rizky Maulana, S.H yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi, mulai dari membantu penulis menemukan gagasan untuk menentukan topik penelitian sampai skripsi ini di ACC oleh Pembimbing.
13. Kepada teman seperjuangan penulis terkhusus kepada Fatmawati, S.H, dan Wikda Hasti Bintari yang juga telah banyak membantu penulis dalam menemukan gagasan, semangat, doa, dan kebersamaan nya sampai skripsi ini di ACC oleh Pembimbing.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Muhamad Nandi, M. Novri, Eki Sudarno, Miftahul, Rizqi Lazuardi, Robi'ul, Shinta, Ulfa, Diana, Karin, Alifia, Odie, Rika, Betha, dan teman-teman yang lain nya yang tidak bisa disebutkan nama nya satu-persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Ilmu Hukum E dan Ilmu Hukum A, Kawan-kawan Di Kabinet Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, dan teman-teman seAngkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan nama nya satu-persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aammiin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Penulis,

CACA SASMI OKTA PRAYATI

NIM. 11727202035



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperjualbelikan, menyewakan, atau menggunakan karya tulis ini untuk tujuan komersial apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	14
F. Populasi dan Sample Penelitian.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	20
A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	20
B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	22
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	24
D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	28
BAB III KAJIAN TEORI.....	29
A. Tinjauan Pelaksanaan Tugas.....	29
b. Pelaksanaan	34
c. Tugas	41
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42
C. Tinjauan Kekerasan Seksual.....	46
c. Bentuk Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.....	49
D. Tinjauan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.....	59
B. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
A. Buku/ Literatur.....	82
B. Jurnal.....	84
C. Perundang-Undangan.....	86
D. Website.....	87
LAMPIRAN.....	89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1.1	16
Tabel IV. 1.....	64
Tabel IV. 1. 1.....	65



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	28
------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Pelecehan Seksual. Variabel kekerasan pada perempuan sebagai variabel dependen didefinisikan sebagai salah satu varian dari kejahatan. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam setahun terakhir ia atau harta bendanya mengalami usaha percobaan tindak kejahatan.¹

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disebutkan di dalam pasal 28I ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan*

¹ Meilani & Asriwandari, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Pekanbaru*, (Jurnal Keluarga Berencana 2019) Vol. 3 No. 1, hlm.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudaki, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*²

Membahas mengenai kekerasan terutama korbanya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat terjadinya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa.³ Hal ini dikeranakan adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada msyarakat kita menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.⁴

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan

² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1)

³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 26

⁴ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT. Refka Aditama, 2010), hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.⁵ Untuk dapat memahami dan mencari sumber kekerasan sebagai sebuah fenomena sosial, harus dilakukan telaah dari berbagai aspek, antara lain dengan telaah gender, karena sebagai konstruksi sosial, telaah gender merupakan satu cara pandang yang sangat penting untuk dibahas dalam mencoba memahami fenomena kekerasan secara lebih utuh, dalam hal tersebut termasuk meneropong sasaran kekerasan, pelaku kekerasan dan kompleksitas konstruksi sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan.⁶

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan seperti kekerasan Berbasis Gender (KBG). Definisi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sendiri menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UHCR) atau disebut Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi adalah Kekerasan berbasis gender diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini

⁵ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

⁶ M. Fakhri, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan.⁷

Istilah "Kekerasan Berbasis Gender" memberi penekanan khusus pada akar masalah dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu ketimpangan gender.⁸ Artinya, diantara pelaku dan korban kekerasan terdapat relasi gender, dimana pelaku mengendalikan dan korbannya dikendalikan melalui tindakan tersebut. Kekerasan Berbasis Gender mencakup perbuatan yang menimbulkan dampak negatif atau penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman perbuatan tersebut, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.⁹

Kekerasan kepada perempuann berbasis gender merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan kepada perempuan dengan alasan korban adalah perempuan. Kekerasan kepada perempuan tersebut disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang diperparah dengan relasi kekuasaan yang masih timpang antara laki-laki dengan perempuan. Adanya ideologi patriarki yang menempatkan posisi perempuan dibawa laki-laki juga memicu pelanggaran tindakan-tindakan kekerasan kepada perempuan.

⁷ Mosso. Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 2

⁸ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Jurnal Komstitusi, Desember 2015), Vol. 12 No. 4, hlm. 723

⁹ A. R. Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, (Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 2009) Vol 21 No. 2, hlm. 398



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan isteri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), dukungan pemerintah Indonesia terhadap tujuan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) yang dikemukakan dalam keterangan pemerintah di DPR pada tahun 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita.¹⁰

Definisi korban yang hampir serupa juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (3). Dampak terbesar dari Kekerasan Berbasis Gender terhadap korban adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Selain itu, perbuatan Kekerasan Berbasis Gender juga menimbulkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri. Oleh karenanya korban dari kejahatan Kekerasan Berbasis Gender juga berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan

¹⁰ Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 132



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan definisi Pasal 1 ayat (3) yang sesuai dengan korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG).¹¹

Faktor-faktor pendukung terjadinya Kekerasan Berbasis Gender beragam menurut lingkungan, penduduk, dan jenis Kekerasan Berbasis Gender. Jenis-jenis Kekerasan Berbasis Gender yaitu:

- a. Kekerasan Seksual
- b. Kekerasan Fisik
- c. Kekerasan Mental dan Psikologis
- d. Kekerasan Sosial dan Ekonomi

Lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak pada tingkat pusat adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya bernama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kemmeneg PP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tingkat daerah dalam hal ini Kota Pekanbaru, lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yaitu

¹¹ Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru¹² dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,¹³

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan yang sudah tercantum dalam Pasal 14 Bagian Keempat Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁴ Namun tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah kurangnya Sumber Daya Manusia seperti Tenaga Advokat, Tenaga Konselor, dan Tenaga Psikolog. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi maupun institusi. Sumber Daya Manusia yang dimaksud sangat dibutuhkan oleh Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dikarenakan jika dalam 1 hari kasus yang masuk lebih dari 2

¹² Lihat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

¹³ Lihat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

¹⁴ *Op. Cit*, Pasal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus dan pelayanan penanganan korban akan menjadi terhambat.¹⁵ Oleh karenanya ketentuan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi sangat diperlukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak untuk didapatkan oleh korban pelecehan seksual yang dimohonkan oleh korban terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dalam Pasal 37 hingga Pasal 44.¹⁶ Sedangkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan bentuk pelayanan dan bantuan psikologis dan sosial yang memiliki tujuan meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban.¹⁷

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

¹⁵ Fikri Aditya Pratama, *Bestuurs Plan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Tahun 2018*, (JOM FISIP: Edisi I Januari – Juni 2020) Vol 7, hlm. 12

¹⁶ Lihat Pasal 37- 44 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban

¹⁷ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak
3. Rendahnya kualitas perlindungan anak.¹⁸

Kasus pelecehan seksual di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun meningkat. Di tahun 2019 saja kasus pelecehan seksual di kota pekanbaru mencapai 170 kasus. Hal itu diketahui berdasarkan data yang dari Unit Kedokteran Forensik RS Bhayangkara Pekanbaru Biddokkes Polda Riau sepanjang 2019. Para korban rata-rata di dominasi oleh anak dibawah umur 18 tahun dan sisanya adalah berusia diatas 18 tahun, kasus yang dialami para korban juga adalah berupa pencabulan, pemerkosaan, dan perzinaan. Para pelaku yang dijumpai merupakan orang terdekat seperti teman, keluarga, tetangga, dan pelaku lainnya.¹⁹

Seperti kasus berikut yang terjadi pada tahun 2018, seorang oknum pelatih dayung berinisial MY alias Yana yang ditangkap Satreskrim Polresta Pekanbaru, Rabu (14/11/2018) atas dugaan pelecehan seksual terhadap dua anak di bawah umur. Tidak hanya dua, diduga kuat ada empat korban lainnya. Dugaan pelcehan seksual ini terungkap setelah orangtua korban curiga dengan aktifitas anaknya yang nilai sekolahnya selalu menurun. Saat ditanya, korban

¹⁸ *Loc. Cit.* hlm. 3

¹⁹ <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/01/2020/219106/kasus-kekerasan-seksual-meningkat.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya mengakui jika telah menjadi korban pelecehan oleh terlapor.²⁰ Dan kasus di tahun 2019 seorang remaja berinisial JA (18) di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, diduga hendak melakukan percobaan pemerkosaan terhadap YS (29) yang tak lain adalah tantenya sendiri. Peristiwa itu terjadi di rumah korban, saat suaminya sedang tidak ada. Usai kejadian itu, pelaku sempat diamankan dan diserahkan ke polisi. Namun, kedua belah pihak sepakat berdamai.²¹

Melihat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, maka terlihat bahwa pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan belum berjalan maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hokum atau skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan”**

²⁰<https://m.goriau.com/berita/baca/diduga-ada-6-bocah-korban-pelecehan-seksual-pelatih-kepala-dayung-riau.html>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020

²¹https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/10/18/13200151/seorang-remaja-di-pekanbaru-coba-perkosa-tantenya-yang-sedang-berbaring?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFOArABIA%3D%3D#aoh=16087127272289&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Peraturan Waliokota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu system dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.

²² Untuk mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya fenomena yang terjadi mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan

²² Zainal Abidin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

F. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi ialah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Sampel ialah sebagian elemen dari populasi.²³

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Total Sampling dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sampel dengan metode pengambilan sampling yaitu wawancara, observasi, dan lain sebagainya.²⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mana paling utama adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang, Staff Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang, serta Korban kekerasan seksual

²³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

²⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan kekerasan berbasis gender sebanyak 3 orang korban²⁵ dan dijadikan sample sebanyak 2 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang akan diteliti berjumlah 5 orang.

Table 1.1
Populasi dan Sample

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1	1
2	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1
3	Staff Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1
4	Korban Kekerasan Seksual	3	2

Sumber: *Data Lapangan 2020*

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru serta Korban pelecehan seksual baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.

²⁵ <http://dp3am.pekanbaru.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.²⁶

2. Metode Pengumpulan Data

- 1) Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.
- 2) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang bergerak dalam pemberdayaan serta perlindungan perempuan serta korban untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- 3) Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan peraturan yang berlaku.

²⁶ Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yaitu membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat berupa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Dan sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian nya.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang

²⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁸



UIN SUSKA RIAU

²⁸ Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah salah satu dari Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Pekanbaru. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sendiri dibentuk berdasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru juga bergabung dalam Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan menjadi satu bidang yang disebut dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Sekitar pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri mempersilahkan Bidang Pemberdayaan Perempuan yang ingin membuat suatu dinas yang terpisah pemberdayaan perempuannya dengan ketentuan harus mengisi variable yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri itu sendiri. Variabel yang harus diisi tersebut antara lain, jumlah organisasi perempuan, lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah perempuan korban kekerasan dan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Setelah variabel tersebut diisi dengan data dan fakta, maka berdasarkan variabel yang telah diverifikasi dan telah dinilai oleh tim pusat, Bidang Pemberdayaan Perempuan mendapatkan skor sebanyak 990. Dengan jumlah skor tersebut, bidang ini dapat menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A (tidak bergabung dengan dinas lain) agar dapat lebih konsentrasi mengurus perempuan dan anak. Melihat kondisi keuangan daerah pada saat itu, maka Walikota Pekanbaru menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan tipe B, yakni dengan 1 sekretaris, 2 kasubag, 3 bidang, dan 9 kasi.

Dikarenakan kebutuhan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka pada tahun 2016 terjadi proses pembentukan nya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat diperlukan, maka pada tahun 2017 disahkanlah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Dagang No.78 Kp. Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Selaras dengan penetapannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan *“Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, daerah, kecamatan dan kelurahan.”*²⁹ maka seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mewujudkan serta mendukung visi misi yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru yaitu *“Menjadikan Kota Pekanbaru Smart City Yang Madani”*. Untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan 6 pilar yaitu:

1. *Smart Government*
2. *Smart People*
3. *Smart Environment*
4. *Smart Economy*
5. *Smart Mobility*
6. *Smart Living*

²⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 1 angka 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah "Masyarakat Madani" . untuk mewujudkan strategi masyarakat yang madani dengan adanya revolusi mental. Revolusi mental merupakan gerakan perubahan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing melalui peningkatan akhlak, pembentukan karakter dan kualitas masyarakat atau gerakan menciptakan masyarakat madani. Revolusi mental sendiri memiliki 3 pilar yaitu:

1. Dimensi Akhlak
2. Dimensi Karakter
3. Dimensi Kualitas

Kemudian dengan adanya 3 pilar tersebut dilakukan nya pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Sedangkan untuk misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sendiri yaitu:

1. Mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
2. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Organisasi Yang Berkualitas.³⁰

C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan, Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

³⁰ <http://dp3am.pekanbaru.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 16 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintahan Kota Pekanbaru membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang tugas dan fungsinya dibidang:

1. Sosial
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Mental dan Spiritual
7. Ketentraman dan ketertiban

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Walikota yakni Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022 diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender adalah:

1. Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan disemua jenjang, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana.
3. Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha dibidang ekonomi produktif, termasuk mendapat modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha.
4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan diberbagai sector.
5. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (trafficking) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.³¹

Salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru adalah melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9

³¹ Lihat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

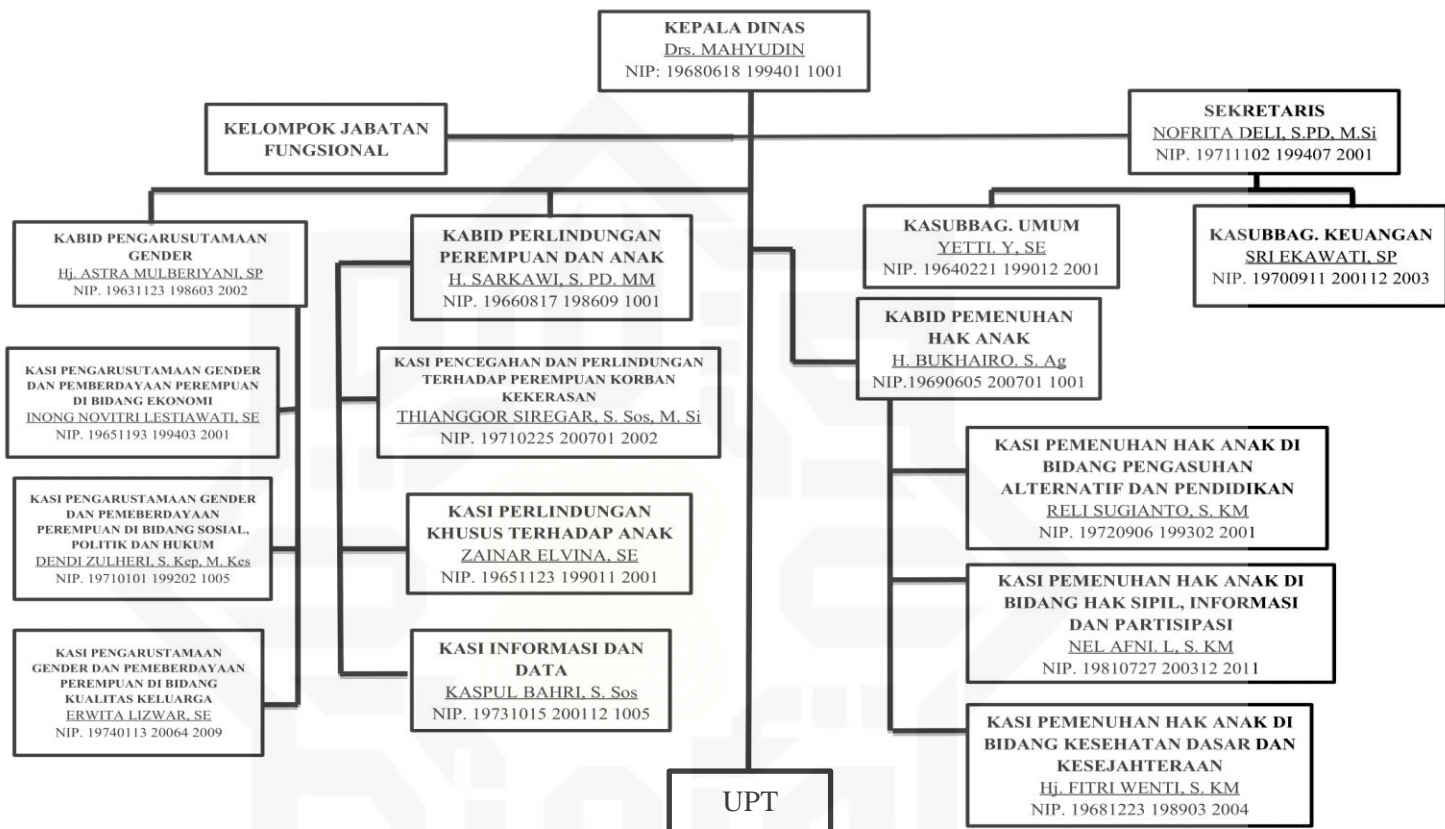
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Gambar 1.1
Skema Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pelaksanaan Tugas

a. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:³²

- a. Tingkat hidup masyarakat meningkat
- b. Terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual
- c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi)
- d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah

³² Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), hlm. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan implemtatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.³³

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.³⁴

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti

³³ Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003), hlm.90

³⁴ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*,(Jakarta: Inti Ilmu, 2003), hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya*”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.³⁵

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan

³⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :³⁶

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

³⁶ Ibid, hlm. 32-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Menurut Suharno, proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks).³⁷

³⁷ Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³⁸

Pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan

³⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut.³⁹

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

- a. Spesifikasi rinian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
- b. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- c. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (stakeholders). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan

³⁹ Abdullah Ramdhani & M. Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, (Jurnal Publik: ISSN: 1412-7083, 2017) Vol. 11: No. 01, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.⁴⁰

Menurut Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya yaitu:⁴¹

a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.

⁴⁰ Ibid, Abdullah Ramdhani& M. Ali Ramdhani, hlm. 4

⁴¹ Wahyudi, *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*, (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik: 2016), Vol. 2, hlm. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu system yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.

⁴²

c. Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

⁴² Loc. Cit, Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.⁴³

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Model Helmut Wollman menguraikan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada tiga tipe utama, yaitu:⁴⁴

⁴³ Sholichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31

⁴⁴ Tulus, Egetan & Lintjewas, *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*, (Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan: 2016) Vol. 2, hlm. 82-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante)

Evaluasi ex-ante adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going)

Evaluasi on-going secara umum dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan dimaksudkan untuk evaluasi penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan.

c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)

Evaluasi ex-post adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisa tingkat pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ex-post digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian masalah).

Di dalam pelaksanaan kebijakan public ada juga yang disebut diskresi. Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pelaksana kebijakan public (para pejabat administrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang berwenang dan berwajib) menurut pendapat sendiri.⁴⁵ Diskresi merupakan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh penilaian pribadi, yang tidak terikat dengan hukum yang berlaku. Diskresi adalah kebebasan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan kebijakan publik, sesuai dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan negara kepada masyarakat yang semakin kompleks.

Ruang lingkup diskresi meliputi adanya kekuasaan pelaksana kebijakan (pejabat public) untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri, karena adanya pilihan keputusan atau tindakan, peraturan tidak mengatur, peraturan tidak lengkap, ataupun karena adanya stagnasi pemerintahan. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau kewewenangan yang melekat pada dirinya selaku pengambil keputusan.⁴⁶ Keputusan diskresi biasanya digunakan dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Umumnya, pelaksana kebijakan dituntut harus dapat memahami dinamika kemasyarakatan secara personal, terlebih lagi pelaksana kebijakan yang harus mengatasi akibat dari keputusan yang mereka berikan dalam pelayanan masyarakat. Adanya derajat kebebasan ini, dapat menyebabkan tidak seragamnya pelayanan yang diperoleh

⁴⁵ Purnama, Syahbandir & Mustafa *Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan Daerah*, (Jurnal Magister Ilmu Hukum: 2016), Vol. 2, hlm. 3

⁴⁶ *Ibid*, Mustafa, Purnama, & Syahbandir, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat pelaksana kebijakan. Penggunaan diskresi bagi pelaksana kebijakan misalnya pemanfaatan budaya lokal, penggunaan sumberdaya lokal, atau penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan suatu kebijakan.⁴⁷

c. Tugas

Pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.⁴⁸

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder, “The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone, mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).⁴⁹ Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner, menyatakan bahwa “Tugas

⁴⁷ Pradana, *Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen)*, (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik; 2016), Vol. 2 No. 3, hlm. 80

⁴⁸ Moekijat, *Pembagian Tugas Dalam Pemerintahan*, (Bandung: Alfabeta, 1998), hlm. 9

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 10



adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat, “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.⁵⁰

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Perempuan

Pengertian perempuan, perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.⁵¹

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁵² Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sanskerta, dengan dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek jadi subjek.⁵³

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif,

⁵¹ Fauzan Khairazi, *Implimentasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jurnal Inovatif: Januari 2015), Vol.8, No.1, hlm. 81

⁵² *Op. Cit*, Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 135

⁵³ Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta : LkiS, 2005), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikomotorik, afektif, dengan penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.⁵⁴

b. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁵

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁶

⁵⁴ Ambar T. Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 80

⁵⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:⁵⁷

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya
- b. Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi
- c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living)
- d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk

⁵⁷ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

C. Tinjauan Kekerasan Seksual

a. Kekerasan

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.⁵⁸

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.⁵⁹

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hamper semua pola-pola kekerasan yakni:⁶⁰

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.30

⁵⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.17

⁶⁰ Halim Barkatullah&Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kekerasan legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosoal memeperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidal legal akan tetapi taka da sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. “illegal, nonsanctioned, irrational violence”

Yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhan).

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi. Hal yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa pelecehan sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok yang sangat ofensif dan membuat malu perempuan serta perilaku sengaja menyenggol atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa seizin dari kerelaan yang bersangkutan.

b. Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seksual adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti lain pun seksual adalah Aktifitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik.

Sedangkan pengertian seksual secara umum menurut Dewi adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan persoalan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bentuk Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁶¹

Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, dan lain-lain. Konteks kekerasan terhadap perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya lebih menekankan pada kekerasan baik terhadap perempuan dewasa maupun anak perempuan. Meskipun kekerasan terhadap anak perempuan lebih banyak terjadi, tetapi kekerasan terhadap anak laki-laki juga dapat melahirkan dampak psikologis dalam perkembangannya yang mungkin berdampak pada perilaku yang buruk atau bahkan melakukan tindak kekerasan ketika dewasa.⁶²

⁶¹ Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 2017), hlm. 16.

⁶² *Ibid*, hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, diantaranya:⁶³

- a. Tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, merusak alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga – lembaga pendidikan, dan sebagainya.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan

⁶³ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKis, 2002), hlm.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁶⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Kwako dkk bahwa sumber terjadinya kekerasan pada anak, muncul sebagai perilaku psikopatologi dan kerusakan attachment di masa kecil. Artinya buruknya hubungan interpersonal antara anak dan orang tua atau Pengasuh dan tidak terbangunnya attachment dengan anak, dapat mempengaruhi kehidupan anak. Memahami dampak kekerasan terhadap kepribadian anak, selanjutnya akan dibahas tipologi kekerasan dan dinamika kepribadian yang terjadi.⁶⁵ Berdasarkan pada tipe kekerasan Krug mendefinisikan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan memiliki kekuasaan. Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik.
- b. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui, atau secara perkembangan tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan. Pelecehan seksual terhadap anak

⁶⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 42.

⁶⁵ Alit Kurniasari, *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak*, (Jurnal Sosio Informa: Kesejahteraan Sosial, 2019), Vol. 5, No. 01, Januari - April, Tahun 2019, hlm. 18

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. kekuasaan. Aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila, sampai pada pemerkosan.

c. Kekerasan psikologis atau emosional yakni kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figure kelekatan (attachment primer), sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal.

d. Penelantaran (neglect) yaitu kegagalan orang tua atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh.

D. Tinjauan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi permasalahan yang masih terus terjadi, bahkan meningkat. Dan merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling kejam, dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, dan sebagainya. Hak asasi ini bersifat langgeng dan menyeluruh, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap Negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia berkembang terus menerus, sehingga kebijakan regulasi perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pun dibuat. Dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tuga Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota, latar belakang lahirnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tuga Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ini dikarenakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia.
3. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu.
4. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tuga Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk membantu terwujudnya rasa aman terhadap seluruh warga Negara khususnya Kota Pekanbaru dari ancaman tindak kekerasan terhadap perempuan dan aman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 10 terdapat upaya pencegahan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterbitkan oleh Pemerintah khususnya Walikota Pekanbaru, yaitu:⁶⁷

1. Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
2. Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal dan informal.
 - b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social.
 - c. Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan.
 - d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
 - e. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses.

⁶⁷ *Loc. Cit*, Pasal 10 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan / atau peduli terhadap perempuan dan anak, dan
- g. Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya dibidang:⁶⁸

- a) Sosial
- b) Kesehatan
- c) Pendidikan
- d) Ketanagakerjaan
- e) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f) Mental dan spiritual, dan
- g) Ketentraman dan ketertiban

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban

⁶⁸ Ibid, Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Contohnya: SKPD dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas pemuda dan olahraga, dan lain sebagainya,⁶⁹ namun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, ada perubahan mendasar dalam penamaan dinas/badan di provinsi, kabupaten/kota. Jika sebelumnya dinas/badan disebut juga sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini namanya berubah organisasi perangkat daerah (OPD).⁷⁰

Bentuk-bentuk pelayanan korban kekerasan seksual sendiri tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan:⁷¹

- 1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. Pelayanan pengaduan
 - b. Pelayanan kesehatan
 - c. Bantuan hukum
 - d. Pemulangan
 - e. Rehabilitasi, reintegrasisosial, dan medikolegal

⁶⁹ <https://www.pengadaan.web.id/2019/11/skpd-adalah.html> diakses tgl 11 juni 2021

⁷⁰ <https://www.borneonews.co.id/berita/59738-skpd-diubah-menjadi-opd> diakses tgl 11 juni 2021

⁷¹ *Op. Cit.* Pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pelayanan identifikasi, dan

g. Pelayanan psikologis

2) Bentuk pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang (1), ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang:

- a. Sosial
- b. Kesehatan
- c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Mental dan spiritual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada praktiknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru maupun Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik diantaranya belum maksimalnya dalam melaksanakan:

a. Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, terlihat dari kurangnya dalam memberikan pelayanan pengaduan terhadap korban, konseling, bantuan hukum dikarenakan masih kurangnya konselor psikolog dan konselor hukum yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru ke masyarakat.
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru baik dari kendaraan yang bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau di Kota Pekanbaru.
- d. Serta kurangnya kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban seksual

2. Adapun faktor yang menghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang dihadapi.
- b. Kurangnya penjelasan dari korban serta keadaan korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurangnya tenaga ahli, konselor, dan petugas yang memumpuni dibidang psikologi, dan hukum.
- d. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru maupun Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kehadiran nya ditengah masyarakat dalam memberikan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual.

B. Saran

Agar Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran:

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru agar lebih membangun kedekatan terlebih utama kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru maupun siap sedia melayani masyarakat dalam mempunyai pengaduan, memberikan perlindungan, bimbingan konseling terhadap korban, serta bantuan hukum untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana terutama mengadakan jenis kendaraan operasional yang mendukung kegiatan-kegiatan dilapangan, mengadakan pelatihan khusus atau meningkatkan kapasitas kepada para petugas, dan meningkatkan tenaga ahli yang memumpuni dibidang nya seperti dalam bidang psikolog dan bantuan hukum sehingga pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan baik, dan
3. Serta masyarakat diharapkan untuk semakin aktif dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terutama melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya terhadap perempuan korban kekerasan seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Literatur

- Abiding Zainal, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adisasmita. Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggraini. Lysa, 2016, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia.
- Cleves. Julia, Mosso, 2007, *Gender & Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi. Heriana Eka, 2012, *Memahamami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Djamil. M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakih. M, 1996, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Faqih. Mansour, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasyim. Syafiq, 2005, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Yogyakarta : LkiS.
- Irfan. Muhammad, Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Jannah. Fathul, dkk., 2011, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Joko. Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono. Bambang, Dkk, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu.
- Moekijat, 1998, *Pembagian Tugas Dalam Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta.
- Muhadjir. Noeng, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Muhadjir. Noeng H, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta : Rake Sarakin.
- Prasetyo. Teguh, Halim Barkatullah, 2006, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said. Ali, Dkk 2017, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Soerjono. Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soewadji. Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suharno., 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulistyani. Ambar T., 2014, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Sunggono. Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparto. J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suyanto. Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tanamas. Zulchaina Z, dan Mohammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahab. Sholichin Abdul, 2010, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno. Budi, 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Jurnal

- Asriwandri. Meilani, 2019, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Keluarga Berencana 2019, Vol. 3 No. 1
- Crishtian. Jordy Herry, 2020, *Sekstoris: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Mulia, Vol. 9 No. 1.
- Lintjewas, Tulus & Egetan, 2016, *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol. 2, No. 20

Karnia. Dede, 2015, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4.

Khairazi. Fauzan, 2015, *Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Inovatif: Januari 2015, Vol.8, No.1

Kurniasari. Alit, 2019, *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak*, (Jurnal Sosio Informa: Kesejahteraan Sosial, 2019, Vol. 5, No. 01, Januari - April, Tahun 2019.

Mustafa, Purnama, & Syahbandir, 2016, *Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan Daerah*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 2,

Pradana, 2016, *Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 2 No. 3.

Pratama Fikri Aditya, 2020, *Bestuurs Plan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Tahun 2018*, JOM FISIP: Edisi I Januari – Juni 2020, Vol 7.

Ramdhani. Ali, M., Abdullah Ramdhani 2017, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik: ISSN: 1412-7083, Vol. 11: No. 01

Wahyudi, 2016, *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 2

Widyastuti A. R, 2009, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol 21 No. 2.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

D. Website

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru <http://dp3am.pekanbaru.go.id/>,

GoRiau, *Diduga Ada 6 Bocah Korban Pelecehan Seksual Pelatih Kepala Dayung Riau*, <https://m.goriau.com/berita/baca/diduga-ada-6-bocah-korban-pelecehan-seksual-pelatih-kepala-dayung-riau.html>

Indonesia AIDS Coalition, *Seks, Seksual, dan Seksualitas*, <https://www.iac.or.id/seks-seksual-dan-seksualitas/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Seksual*, <https://kbbi.web.id/seksual>

Kompas, *Seorang Remaja di Pekanbaru Coba Perkosa Tantenya Yang Sedang Berbaring Depan TV, Begini Awal Kejadiannya*, <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/10/18/13200151/seorang-remaja-di-pekanbaru-coba-perkosa-tantenya-yang-sedang->



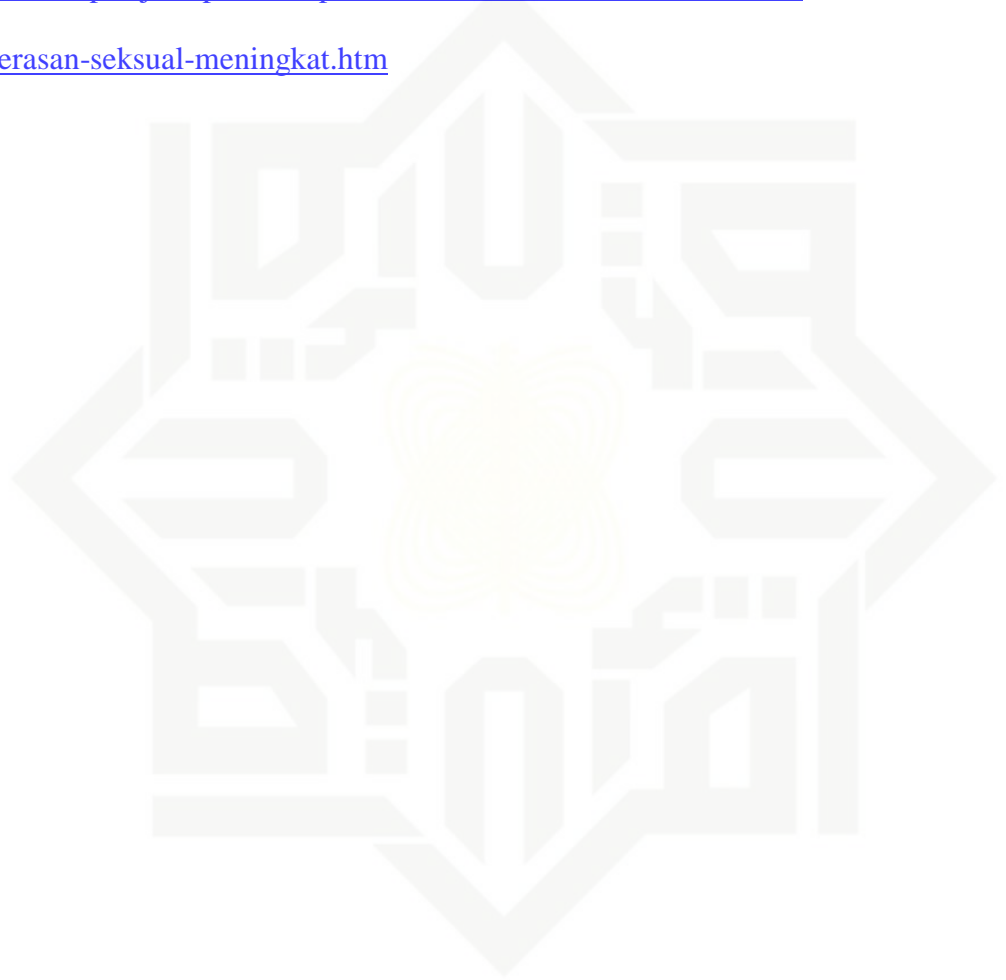
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbaring?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16087127272289&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s

Riau Pos, *Kekerasa Seksual Meningkat*,

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/01/2020/219106/kasus-kekerasan-seksual-meningkat.htm>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual?
2. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru telah memberikan bimbingan pribadi social untuk para korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana prosedur penanganan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap korban kekerasan seksual?
4. Kategori kekerasan seksual seperti apa yang sering didominasi terjadi pada korban kekerasan seksual?
5. Untuk jumlah perempuan korban kekerasan seksual, apakah setiap tahun semakin menaik?
6. Dalam menangani kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual, apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan penegak hukum?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **CACA SASMI OKTA PRAYATI**
 NIM : 11727202035
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris

Desi Devika Devra, M. Si

Penguji I

Hellen Last Fitriani, SH., M.H

Penguji II

Nur Hidayat, SH., M.H

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam
Memberikan Pertolongan ditulis oleh saudara :
Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Nama : CACA SAGMI OKTA PRAYATI

NIM : 11727202039

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : 19 FEBRUARY 2021 / Jumat

Narasumber : NURHIDAYAT, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
Narasumber

NURHIDAYAT S.H., M.H.
NIP. 130217038

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39215
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2435/2021 Tanggal 26 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : CACA SASMI OKTA PRAYATI |
| 2. NIM / KTP | : 11727202035 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dagang No. 78, Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 670/ DPP-PA-SEKRET/ 379 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ZUBIR, S.Ag. MH
Nip : NIP.19700228 199803 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas PP-PA Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : CACA SASMI OKTA PRAYATI
NIM : 11727202035
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhitung tanggal 01 Maret sampai 31 Maret 2021 untuk
memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN
FUNGSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sepenuhnya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru,

H. ZUBIR, S.Ag. MH
NIP.19700228 199803 1 002

Tembusan:

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/748/2021



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/39215 tanggal 2 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **CACA SASMI OKTA PRAYATI**
2. NIM : **11727202035**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL. CAMAR RAYA NO. 6 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19750715 199311 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2435/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CACA SASMI OKTA PRAYATI
NIM : 11727202035
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



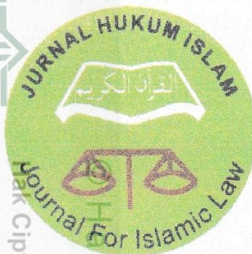
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : CACA SASMI OKTA PRAYATI

NIM : 11727202035

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pembimbing: Musrifah, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Praya yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Tanggal 27 Oktober 1998 dari pasangan Bapak Maferdi dan Ibu Isnaningsih yang diberi nama **“CACA SASMI OKTA PRAYATI”** yang merupakan anak Kedua dari Tiga bersaudara. Riwayat pendidikan penulis, pada tahun 2005 penulis masuk Sekolah Dasar 01 Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, lalu pada tahun 2006 penulis pindah Domisili ke Pekanbaru dan melanjutkan pendidikan sampai lulus di Sekolah Dasar 035 Tampan Kota Pekanbaru di tahun 2011. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Tri Bhakti Kota Pekanbaru, dan pada tahun 2017 penulis lulus di SMAN 14 Pekanbaru.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa UIN SUSKA RIAU, penulis juga mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN SUSKA RIAU sebagai anggota Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi periode 2019-2020.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Setelah itu, pada tahun 2020 penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN DR) di Kelurahan Tanjung Rhu Sei- Duku, Kota Pekanbaru. Pada Tanggal 14 Juli 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan”** dengan predikat sangat memuaskan.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.